

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Dalam konteks bernegara, perekonomian ditempatkan sebagai objek strategis untuk mensejahterahkan masyarakat. Pelopor demokrasi ekonomi Indonesia layaknya Bung Hatta dalam beberapa catatannya juga mengistilahkan bahwa hanya rakyat umumlah yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan. Kedaulatan dan kesatuan itu dinilai dari bangkitnya perekonomian nasional sebagai tolak ukur suatu kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Letak perekonomian dalam konsep negara hukum disebut sebagai negara hukum material yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan bahwa demokrasi meluas mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan baru ini disebut dengan *Welfare Staat* atau Negara Hukum Material.²

Sehingga tepat kemudian tidak adanya satu objekpun dalam menjalankan aktifitas bernegara yang tidak lepas dari pandangan hukum, sebab tanggungjawab dari negara hukum menempatkan negara sebagai *stake holder* atau pemangku kewajiban yang terus akan menyikapi segala keadaan di negara,

¹ Hatta dalam catatannya “Daulat Rakyat” Tahun 1931. Diakses pada 01 November 2019.

² Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm. 26-29.

baik politik, amupun ekonomi, salah satunya dalam penelitian ini yang mengambil unsur perekonomian dalam konteks bernegara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, acara konseptual inti dari arti Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaimanan pergaulan hidup. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya yang akan mempengaruhi keamanan masyarakat dan kedaulatan suatu negara.³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu

³ Siska. *Penegakan Hukum*. www.suduthukum.com. Di akses pada 27 Maret 2019.

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Dari sekian pendapat mengenai penegakan hukum, pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum positif sebagaimana yang berlaku dalam suatu negara termasuk Indonesia, yang sebagai Negara Hukum. Penegakan hukum bermakna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dengan bertumpu pada ketentuan hukum guna menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kepastian serta mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara-cara yang bersifat procedural yang telah diatur sebagaimana oleh hukum formil. Disamping itu, penegakan hukum adalah suatu proses yang banyak melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya.

Dalam penerapan penegakan hukum yang sejatinya dilaksanakan oleh 4 (empat) pilar penegak hukum⁵, maka masuklah dalam ranah implementasi yang bergerak menjalankan adanya pertentangan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak baik komponen pengusaha, maupun masyarakat, karena hukum bukan hanya sebagai gejala normatif, juga sebagai gejala social dan hukum sebagai *order* (tata aturan) dari suatu sistem *rules* aturan-aturan tentang perilaku manusia.⁶ Sehingga dalam menjalankan hukum, penegak hukum tersebut memiliki wewenang untuk mengadili,

⁴ Satjipto Raharjdo. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm 12.

⁵ I Ali Imron. *Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi*. Vol 6. No 1. Maret 2006. Hlm 93.

⁶ Satjipto Raharjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hlm 3.

membela maupun mencari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat yang dapat disebut pula sebagai penegakan hukum secara konkret sebab penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁷, khususnya mengenai penelitian ini yang memiliki focus terhadap perekonomian dalam hal usaha mengenai perikanan yang tentu dapat juga dilakukan secara *illegal* maupun *legal*.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto⁸, bahwa dalam proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut, yakni :

a. Faktor Hukumnya

Hal ini berupa undang-undang, dimana dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Dimana fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak

⁷ *Ibid.* Hlm 34.

⁸ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 42.

hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh dari sisi perangkat lunak adalah pendidikan. Dimana pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dimana penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁹

Penegakan hukum sebagai sebuah proses hukum, didalam sebuah proses ini tidak jarang terjadi gangguan yang diakibatkan adanya ketidakserasian antara tritunggal yaitu nilai, kaidah dan perilaku, dimana ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma didalam kaidah-kaidah

⁹ *Ibid.*

yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

C. Tinjauan Umum Tentang Perikanan

1. Definisi Perikanan

Perikanan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Potensi laut Indonesia yang cukup tinggi¹⁰ inilah yang membuat banyak pihak termasuk negara asing tertarik dan/atau tergiur untuk memanfaatkan bahkan hingga mencurinya. Salah satu potensi terbesar ialah kekayaan ikannya. Kekayaan ikan yang begitu besar harus dapat dilindungi dari berbagai penangkapan ikan yang ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi baik dari warga negara Indonesia sendiri ataupun warga negara asing.

Mengingat sifat usaha perikanan demikian kompleksnya, maka upaya pengaturan secara keseluruhan akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha perikanan itu sendiri. Sebagaimana

¹⁰ Endri. *Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu Hukum, UNRI: vol 5. No. 2. 2015. Hlm. 2

diungkapkan oleh Beverton dalam Firial M. dan Ian R. Smith bahwa mortalitas dalam perikanan tertentu secara fungsional berhubungan dengan jumlah satuan penangkapan yang ikut serta menangkap, kemampuan menangkap, jumlah waktu penangkapan, dan tersebarnya aktivitas penangkapan di daerah perikanan pada musim tertentu. Selanjutnya Anthony Scott, maksud, tujuan, dan manfaat pengaturan perikanan meliputi : ¹¹

- a. Peraturan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha, yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh karena itu, sumber daya ikan adalah milik bersama, tentu bisa dimanfaatkan setiap orang, berarti *stock* (populasi) ikan telah menjadi milik umum.
- b. Peraturan perikanan akan terkait dengan peningkatan kualitas atau kuantitas hasil tangkapan perorangan atau nelayan setiap tahun. Misalnya, bentuk peraturan yang melarang penangkapan ikan pada musim tertentu adalah mencegah persaingan antar nelayan menangkap ikan pada waktu tertentu. Apabila dilanggar, mengakibatkan rusaknya populasi.¹²
- c. Demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itupun ditempuh melalui pengaturan perikanan, antara lain, dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu.
- d. Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna. Hasil tangkap per

¹¹ Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 3.

¹² *Ibid.*

satuan upaya yang cenderung meningkat mengakibatkan tangkapan per satuan upaya semakin rendah. Pemilik atau nelayan tidak menerima pendapatan sebagaimana diharapkan dan nelayan lainnya akan menipis hasil tangkapannya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah dengan memperbesar mesin dan merapatkan mata jaring demi perolehan hasil yang lebih besar.¹³

2. Aspek Hukum Tindak Pidana dalam Bidang Perikanan

Terkait dengan masalah pemerataan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*. Ketentuan semacam ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan bagi kemakmuran bangsa dan negara.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi Pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

¹³ *Ibid.*

- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP; dan
- c. Surat Izin Kapan Pengangkutan Ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yakni:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi;
- b. Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal;
- c. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang :¹⁴
 - 1) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - 2) Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu

¹⁴ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 38-40.

penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004;

- 3) Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004;
- 4) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009;¹⁵
- 5) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009;
- 6) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang

¹⁵ *Ibid.*

tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;

- 7) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;¹⁶
- 8) Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009;
- 9) Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau penangkapan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;
- 10) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 11) Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- 12) Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004;

¹⁶ *Ibid.*

- 13) Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004;
- 14) Merusak plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- 15) Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 16) Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- 17) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.¹⁷

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda. (Ketentuan Pasal 84 s/d Pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009).

D. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing*

1. Pengertian *Illegal Fishing*

¹⁷ *Ibid.*

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun tindak pelanggaran terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.¹⁸

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (UII) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau

¹⁸ Nunung Mahmuda. 2015. *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta: sinar Grafika, Hlm. 79

aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.¹⁹

2. Jenis-Jenis *Illegal Fishing*

Mengenai jenis-jenis *Illegal Fishing*, penulis mengambil beberapa bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan secara *Illegal*. Diantaranya yakni perbuatan penangkapan yang menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap, dokumen palsu, dan melanggar wilayah penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam SIPI.²⁰

¹⁹ Wahyudin, Muksal, Nirzalin, Zulfikar, *Pengaruh Praktek Illegal Fishing terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh*, Seminar Nasional II USM 2017 Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Vol. 1, Oktober 2017, 411-417, Hlm. 413

²⁰ Dewinta Ayu Syahrani, Al mushadied, Ari Darmawan, *Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) Pada Ekspor Ikan Tuna dan Udang Tangkap* (Studi

3. Penegakan Hukum Bagi Pelaku *Illegal Fishing*

Penegakan hukum bagi pelaku *illegal fishing*²¹ sejatinya dilakukan sebagai upaya represif oleh Menteri Kelautan dan perikanan yang bertanggung dingin mengatasi persoalan kemaritiman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan bahwa Investor asing sudah dilarang untuk investasi tangkap ikan di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan dengan adanya instruksi oleh presiden²² secara khusus dan meminta institusi pemerintahan lainnya, seperti Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk menelusuri aliran dana para pelaku *illegal fishing*. Koordinasi antara kementerian-kementerian dengan PPATK juga sangat diperlukan, sehingga benar-benar tahu mengenai data-data *illegal fishing* yang harus diikuti dan dikawal. Arus keuangannya dan data keuangannya harus diketahui dilakukan seperti apa, sehingga tindakan yang dilakukan kementerian itu ada fakta-fakta yang dipakai.

Karena yang terjadi saat ini Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (yang selanjutnya disingkat KKP), terdapat banyak pencurian ikan di wilayah laut Indonesia dan merugikan Indonesia sebesar 20 juta dollar AS setiap tahunnya.²³ Ini disebabkan oleh Keberadaan kapal-kapal

pada Sebelum dan Sesudah Penerapan Permen KP Nomor 56 dan 57/PERMENKP/2014 terhadap Volume Ekspor Tuna dan Udang Tangkap di Jawa Timur)

²¹ Endiyono Raharjo dan Rio Saputra, *Illicit Enrichment dalam Penegakkan Hukum Pengambilan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, Hlm. 44-58

²² Anonim, Berita satu, Jokowi Intruksikan Menteri Susi Terus Beantas *Illegal Fishing*, tersedia dalam <http://www.beritasatu.com/nasional>, diakses pada 01 November 2019.

²³ Isnurhadi, M.R. *Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*, Jurnal Hubungan Internasional UNAIR. Vol 2, 2017. Hlm 14.

asing tanpa izin yang terus mencuri dan mengeksploitasi perairan Indonesia juga memperparah keadaan tersebut.²⁴ Sehingga harus segera diatasi melalui regulasi yang dapat menyelamatkan kepentingan nasional. Untuk menyelamatkan kepentingan nasional tersebut merupakan tanggung jawab negara, karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵

Perlindungan terhadap tegaknya hukum kelautan didasari oleh Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak berdaulat negara pantai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang terkandung di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Akan tetapi hak-hak berdaulat tersebut harus diimbangi dengan kewajiban negara pantai untuk mengambil langkah-langkah konservasi: Pertama, negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan ikan yang terdapat didalam Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua, negara pantai diwajibkan untuk memelihara agar sumber daya ikannya tidak mengalami gejala tangkap lebih dari untuk menjamin hasil maksimum yang lestari.²⁶

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI

²⁴ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, *Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No. 2 Juli 2019, Hlm. 237-248

²⁵ M. Ghufro H. Kordi K. 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Hlm. 21

²⁶ Didik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama, Hm. 103.

Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea selanjutnya disingkat dengan UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disingkat dengan ZEEI) dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat sui generis dan sui juris.²⁷

Gagasan terbaru yang disampaikan oleh Chairil²⁸ bahwa Para Pelaku pelanggaran Illegal Fishing di perairan ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran Illegal Fishing terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran Illegal Fishing oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut. Karena yang terjadi saat ini adalah negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Chairul Anwar. 1998. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Rhineka Cipta, Hlm. 36.

diberikan pada pelaku pelanggaran Illegal Fishing kepada Negara yang melakukan tindak Pidana.²⁹

Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di bebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana Illegal Fishing yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa UU dan Peraturan Pemerintah,³⁰ sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.

4. Peran kepolisian Proses Penyidikan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing*

Pengelolaan perikanan perlu didukung oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan maksud agar pelaksanaan pengelolaan berjalan baik dan menjamin tercapai perikanan yang bertanggung jawab. Untuk menjaga peraturan-peraturan ini diperlukan dukungan pengawasan di lakukan di darat yaitu di pelabuhan-pelabuhan di mana kapal penangkap bersandar atau berlabuh dipelabuhan. Sewaktu-waktu diadakan pengawasan di laut melalui patroli kapal-kapal pengawas. Sehingga kini tanggung jawab pengawasan di DKP. Sesuai dengan undang-undang, tugas pengawasan ini didukung oleh Angkatan Laut dan Polisi Perairan.³¹

²⁹ E Mantjoro Dan Potoh O. 1993. *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Bandung: Alumni. Hlm. 73.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Bakrie Rudiansyah, *Role in Handling of Administrative Activity Unauthorized Fishing in the waters of Raja Ampat (peran aparatur negara dalam penanganan kegiatan perikanan yang tidak sah di perairan raja ampat)*, Jurnal Politik 1717, VOL. 11 No. 02. 2015

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi. Pre Ajudikasi: Pada tahapan ini Lembaga atau Instansi penegak hukum yang terlibat secara langsung yaitu penyidik (Polisi, Angkatan Laut dan Penyidik PNS) serta Jaksa (Kejaksaan).

Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi maupun laporan mengenai adanya suatu tindak pidana *Illegal Fishing*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni dengan melakukan kegiatan pengawasan Gelar Patroli Keamanan Laut, sejauh ini yang menggunakan insipatif gelar patrol keamanan laut terdapat didaerah merauke, sehingga tepat kemudian perairan probolinggo menerapkan hal ini sebagai upaya pra penegakan hukum.

Mengenai upaya penyidikan sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana³² yang menyatakan bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

³² Lihat dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012³³ menyatakan:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Pasal 184 KUHAP³⁴ menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui polisi dengan adanya laporan polisi atau pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut atau dilakukannya suatu penyidikan.

E. Tinjauan Umum Tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

³³ Lihat dalam Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012

³⁴ Lihat pasal 184 KUHAP

Penyidik sejatinya diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP³⁵ yang dinyatakan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, dalam Pasal 6 KUHAP terdapat batasan bagi pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.³⁶ Konsep mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke 2 KUHAP³⁷ bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Mengenai penyidik pembantu selain diatur dalam aturan Pasal 6 KUHAP tersebut diatas, juga diatur dalam Pasal 10 KUHAP³⁸ yang mengatur tentang penyidik pembantu disamping penyidik.³⁹ Aturan mengenai pasal tersebut untuk memberikan arti bahwa siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut juga ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

³⁵ Lihat dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP

³⁶ Lihat dalam Pasal 6 KUHAP

³⁷ Lihat dalam Pasal 1 butir ke 2 KUHAP

³⁸ Lihat dalam pasal 10 KUHAP

³⁹ Yahya harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan, cet VII, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 110

2. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat menjadi pejabat penyidik jika memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP yakni kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain sebagai berikut: harus menjadi pejabat penyidik penuh sesuai dengan kriteria pejabat penyidik penuh, menjadi penyidik pembantu.⁴⁰

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Arti dari penyidik pegawai negeri sipil ialah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.⁴¹ Wewenang penyidik pegawai PNS nantinya hanya yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Pembatasan mengenai wewenang tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP.⁴²

4. Kewenangan Penyidik menurut KUHAP

Terdapat 21 kewenangan Penyidik menurut KUHAP. Diantaranya yakni:

⁴⁰ Lihat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yang menjelaskan mengenai syarat- syarat kepala kepolisian negara agak dapat diangkat menjadi pejabat penyidik.

⁴¹ Lihat dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP

⁴² Lihat dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP mengenai pembatasan wewenang PNS yang sebagai penyidik dan kedudukannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP.⁴³
- b. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.⁴⁴
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.⁴⁵
- d. Menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁴⁶
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.⁴⁷
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai.⁴⁸
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.⁴⁹
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.⁵⁰

⁴³ Lihat dalam Pasal 8 ayat 1 KUHAP

⁴⁴ Lihat dalam Pasal 8 ayat 2 KUHAP

⁴⁵ Lihat dalam Pasal 106 KUHAP

⁴⁶ Lihat dalam Pasal 8 ayat 3 KUHAP

⁴⁷ Lihat dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP

⁴⁸ Lihat dalam pasal 110 ayat 1 KUHAP

⁴⁹ Lihat dalam Pasal 110 ayat 3 KUHAP

⁵⁰ Lihat dalam Pasal 112 ayat 2 KUHAP

- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum.⁵¹
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka.⁵²
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.⁵³
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya.⁵⁴
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan.⁵⁵
- n. Dalam rangka melakukan penggeladahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjuk tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya.⁵⁶
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeladahan rumah.⁵⁷
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeladahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan

⁵¹ Lihat dalam Pasal 114 KUHAP

⁵² Lihat dalam pasal 116 ayat 4 KUHAP

⁵³ Lihat dalam pasal 117 ayat 2 KUHAP

⁵⁴ Lihat dalam pasal 118 ayat 2 KUHAP

⁵⁵ Lihat dalam pasal 122 KUHAP

⁵⁶ Lihat dalam pasal 125 KUHAP

⁵⁷ Lihat dalam pasal 126 ayat 1 KUHAP

ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.⁵⁸

- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan.⁵⁹
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.⁶⁰
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan.⁶¹
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa.⁶²
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.⁶³

5. Kewenangan Penyidik di bidang Perikanan

Dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2017 tentang penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan,⁶⁴ mengatur mengenai kewenangan penyidik di bidang perikanan, sebagaimana berikut ini: melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, penyerahan

⁵⁸ Lihat dalam pasal 126 ayat 2 KUHAP

⁵⁹ Lihat dalam pasal 128 KUHAP

⁶⁰ Lihat dalam 129 ayat 1 KUHAP

⁶¹ Lihat dalam Pasal 129 ayat 2 KUHAP

⁶² Lihat dalam Pasal 129 ayat 4 KUHAP

⁶³ Lihat dalam Pasal 130 ayat 1 KUHAP

⁶⁴ Lihat dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2017 tentang penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan

tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan⁶⁵ terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

6. Daluarsa Penyidik bagi Tindak Pidana Perikanan

Dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2017 tentang penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan mengatur mengenai SP3 terhadap pelaku atau kasus mengenai *illegal fishing*, yang dimana PPNS perikanan dapat melakukan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak pidana Perikanan, dan diberhentikan demi hukum.⁶⁶ Penjelasan mengenai penghentian demi hukum tersebut diatas ialah ketika tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa, dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁷ Dalam konstruksi pasal tersebut, penjelasan mengenai daluarsa seperti tindak pidana pada umumnya, kecuali mengenai kasus-kasus yang berhubungan setruktural pemerintahan atau yang dilakukan oleh pemerintah.

⁶⁵ Ibid, Lihat dalam Pasal 7 peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2017 tentang penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan

⁶⁶ Ibid, Lihat dalam Pasal 33 ayat 1,2 huruf a,b,dan c peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2017 tentang penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

⁶⁷ Ibid, Lihat dalam pasal 33 ayat 3 peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2017 tentang penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

F. Tinjauan Umum tentang Ajaran Kausalitas

Dalam pandangan Remelink dinyatakan bahwa pembuat undang-undang beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekadar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak (factual cause). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab. Meskipun demikian, berkenaan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat undang-undang pasti sudah hendak memperhitungkan perlunya pembatasan bagi penentuan kejadian yang layak disebut penyebab.⁶⁸

Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal (termasuk yang paling tidak mungkin) yang berkaitan dengan delik. Menurut Remmelink bahwa ajaran relevansilah yang paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam KUHP (Belanda maupun Indonesia). Berbeda dengan Remmelink, menurut Wirjono Prodjodikoro KUHP tidak menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan Hakim diberi keleluasaan memilih diantara teori-teori kausalitas yang dikenal.⁶⁹

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, Hlm 48.

⁶⁹ *Ibid.*

Namun demikian ada beberapa pasal dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan causal verband (hubungan sebab akibat) dalam perumusan deliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya yaitu tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna.⁷⁰



⁷⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa. Hlm 240.